

## **Klarifikasi Terhadap Tuduhan Penyimpangan Pembangunan Masjid Kampus**

Beberapa hari terakhir ini, media massa di Malang memberitakan terjadi penyimpangan, bahkan disebutnya sebagai adanya korupsi dana pembangunan masjid kampus. Bahkan berita itu dilengkapi dengan gambar masjid yang diduga dananya dikorupsi itu. Sehingga seolah-olah korupsi itu memang terjadi. Atas pemberitaan itu, akibatnya banyak orang bertanya-tanya, apa betul dana pembangunan masjid tersebut hingga dikorupsi.

Berkali-kali saya dihubungi oleh wartawan, dan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Sebagian menulisnya dengan tepat, tetapi ada juga yang menulisnya tidak sebagaimana penjelasan yang saya sampaikan. Wartawan yang menulis kurang tepat dimaksud rupanya tidak memahami betul tentang sistem penganggaran di lingkungan pemerintah. Misalnya, disebutkan bahwa masjid itu dibangun dari sisa anggaran tahun 2004 dan 2005. Mana mungkin itu terjadi, sementara kantor pemerintah tidak akan memiliki sisa anggaran hingga bertahun-tahun. Sebab, pada saat akhir tahun, anggaran yang tidak bisa diserap akan hangus, dana itu akan kembali ke kas negara.

Saya sesungguhnya sudah tidak minat lagi bicara dan menulis tentang persoalan dana masjid itu. Akan tetapi, oleh karena banyaknya orang bertanya-tanya, yang rupanya bernada heran, dan mungkin juga sedih membaca berita yang tidak mengenakkan tersebut, maka saya tulis lagi secukupnya. Dengan tulisan ini, saya berharap tidak terjadi lagi salah paham terhadap persoalan yang sebenarnya sangat sederhana ini.

Sebagaimana yang saya jelaskan terdahulu berulang kali, bahwa pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembangunan masjid. Sementara saya berpendapat bahwa apa jadinya, perguruan tinggi Islam tidak memiliki tempat ibadah. Apalagi di kampus itu ada ma'had atau pesantrennya. Saya berpendapat, tidak mungkin dan bahkan tidak elok, sebuah kampus perguruan tinggi Islam tidak memiliki masjid yang bisa digunakan untuk shalat lima waktu dan kegiatan lain bagi warganya.

Oleh karena pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembangunan masjid itu, maka saya berusaha mencari jalan keluar, yaitu menghubungi teman dekat yang sekiranya mau membiayai pembangun tempat ibadah tersebut. Saya bersyukur sampai saat ini, sudah berhasil dibangun dua masjid di kampus, sumbangan dari teman-teman dekat. Bahkan sebenarnya, selain di kampus itu, juga sudah ada belasan masjid lainnya di beberapa tempat yang berhasil dibangun dari sumbangan teman-teman saya yang kebetulan peduli pada pembangunan tempat ibadah.

Masjid yang sehari-hari telah digunakan untuk shalat lima waktu, shalat Jum'at, dan kegiatan menghafal al Qur'an, namun digegerkan itu sebenarnya sudah agak lama selesai pembangunannya, dan bahkan fasilitas itu telah digunakan sejak dua tahun yang lalu. Warga kampus tidak ada yang resah, curiga, atau perasaan negatif lainnya, oleh karena masjid itu memang sepenuhnya sumbangan dari seseorang. Dalam pembangunan itu, penyumbang menyerahkan dananya langsung kepada pelaksana pembangunan. Dana yang diberikan oleh penyumbang tidak diserahkan ke bendahara kampus. Dalam pembangunan masjid kampus itu

juga tidak dibentuk kepanitiaannya, karena tidak diperlukan. Donatur dimaksud menyumbang sebuah masjid dan bukan berupa uang.

Selanjutnya, BPK, Irjen, dan BPKP ketika datang ke kampus juga tidak memeriksa dana pembangunan masjid. Mereka tahu bahwa masjid itu dibangun bukan berasal dari dana pemerintah. Lembaga pengawas keuangan resmi tersebut hanya memeriksa penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah saja. Selain itu, tidak diperiksa, memang dianggap tidak perlu.

Persoalan muncul ketika BPK menemukan bahwa ada dana kampus yang dipinjamkan untuk penyelesaian pembangunan masjid. Menurut pemahaman BPK, bahwa dana kampus tidak boleh dipinjamkan, sekalipun untuk pembangunan masjid yang akan digunakan untuk sarana pendidikan. Sebaliknya, saya menganggapnya boleh. Sebab sebagai kampus yang berstatus BLU, pimpinan diberikan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Apalagi dana itu untuk kepentingan yang mendesak, yaitu masjid yang digunakan oleh mahasiswa yang bertempat tinggal di ma'had. BPK menyarankan agar pinjaman itu dikembalikan, dan tentu saja, saya mengikutinya. Saya segera mencari dana di luar pemerintah untuk mengembalikan pinjaman itu. Atas kemurahan Tuhan, dana itu saya dapatkan sehingga pinjaman itu berhasil saya kembalikan.

Perlu saya jelaskan kembali bahwa, di tengah-tengah proses menyelesaikan pembangunan masjid tersebut, pihak donatur oleh karena kesulitan ekonomi, tidak mampu memenuhi kesanggupannya hingga tuntas. Sebagai jalan keluar, dari pada pembangunan masjid terbengkalai, -----tidak segera selesai, maka atas kewenangan sebagai penanggung jawab BLU, saya meminjam dana dari kampus. Pertimbangan saya, tokh masjid itu juga akan dimiliki dan digunakan oleh warga kampus sendiri. Rasanya kebijakan itu tidak ada yang salah.

Terlepas dari itu semua, selama memimpin kampus, saya merasakan, bahwa banyak orang mengerti betapa sulitnya memenuhi kebutuhan kampus yang ingin maju dan berkembang, sementara anggaran dari pemerintah selalu terbatas. Akan tetapi juga ada saja, satu dua orang yang sulit diberi penjelasan, lalu bahkan menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar. Lewat penjelasan ini, kiranya bisa dipahami, bahwa sebenarnya korupsi pembangunan masjid kampus tidak ada. Negara malah diuntungkan, bahwa sekarang ini, UIN Maliki Malang memiliki kekayaan dua masjid, sekalipun tanpa diberi anggaran sedikitpun dari pemerintah. Dari penjelasan tersebut, lalu mana yang dikorupsi ? *Wallahu a'lam.*